

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2016-2020

Ghovin Rianson Sihaloho

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, ghovinrs026@gmail.com

ABSTRACT

The application of the regional autonomy system requires regional government officials could manage finances in their regions effectively and efficiently. The purpose of this study is to analyze the Jambi City Government financial performance during 2016 to 2020 seen from regional financial independence, the degree of decentralization ratio, the effectiveness of PAD ratio, PAD growth ratio, and expending efficiency ratio. This research is a qualitative descriptive study using secondary data, which is sourced from Jambi City Government Budget Realization Report from 2016 to 2020. The results of this study to indicate the financial performance of Jambi City government, seen from regional financial independence ratio, is depressed level, the pattern of instructive relationship, the degree of decentralization ratios in the low category, the effectiveness ratio are belong to very effective, the average income growth ratio is 11,16 percent and the average expenditure growth is 10,82 percent, and the expending efficiency ratio is classified as efficient.

Keywords: Regional financial performance, financial ratios.

ABSTRAK

Penerapan sistem otonomi daerah menuntut aparat pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan di daerahnya secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2016 hingga 2020 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio efisiensi belanja. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah berada pada level rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, rasio derajat desentralisasi termasuk kategori kurang, rasio efektivitas tergolong sangat efektif, rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja mengalami kenaikan dan penurunan, dan rasio efisiensi belanja tergolong efisien.

Kata Kunci: Kinerja keuangan daerah, rasio keuangan

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memfasilitasi manifestasi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan perubahan besar yang menyertainya dalam struktur ekonomi suatu negara dan distribusi pendapatan ke Komunitas. penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan pembangunan yang mengarah pada pengalokasian alokasi pengelolaan anggaran daerah.

Pengelolaan APBD sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah. Daerah adalah suatu organisasi yang diberi otonomi untuk mengatur kepentingan nasional daerah tersebut. UU No. 33 Tahun 2004 mengatur tentang Perbendaharaan Negara dan APBD.

Berdasarkan UU 33 Tahun 2004, pemerintah daerah harus memiliki otonomi keuangan daerah yang lebih besar. Otonomi fiskal yang lebih besar berarti bahwa pemerintah daerah kurang bergantung pada dukungan pemerintah pusat dan negara bagian melalui dana investasi.

Halim (2012) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat menjalankan otonominya adalah kekuatan keuangan daerah, yang berarti bahwa daerah tersebut harus memiliki yurisdiksi dan kemampuan untuk menemukan sumber daya alam, pemerintah, pengelolaan dan pembangunan untuk menyediakan pembiayaan, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengelolaan pemerintah dan ketergantungan pada bantuan pusat harus dikurangi, kemudian pendapatan Sektor primer (PAD) mungkin merupakan bagian terpenting dari sumber daya keuangan, sehingga peran pemerintah sebagai sektor yang lebih luas tetap sangat tergantung pada pusat. pendapatan pemerintah.

Survei ini dilakukan rangkap dua dengan survei sebelumnya oleh Rahayu (2018) yang melakukan analisis wajar untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Globogan untuk tahun anggaran 2014 hingga 2018. Dalam kajian Pemerintah Kabupaten Globogan untuk keuangan tahun 2014 hingga 2018. sendiri, Rahayu (2018) menemukan bahwa rata-rata kinerja keuangan Kabupaten Globogan sangat baik, berdasarkan analisis rasio keuangan. Pola hubungan kemandirian daerah di Kabupaten Grobogan selama 5 tahun terakhir masih

menunjukkan pola hubungan yang jelas dimana peran pemerintah pusat mengatur kebebasan pemerintah daerah dengan kemandirian daerah yang moderat adalah 13,56. Pencapaian derajat kebebasan ini masih rendah.

Penelitian Mentari Wachid (2013) mengemukakan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Malang periode 2008-2012 dapat dikatakan baik karena setiap tahun dapat mengoptimalkan kapasitas keuangannya walaupun rasionya rendah. tidak memungkinkan. Selain itu, kinerja keuangan 2008-2012 juga menunjukkan trend positif karena efisiensi operasional dapat meningkat setiap tahun dan pendapatan SILPA tahun berjalan selalu meningkat karena kinerja PAD di masa depan komponen kabupaten. Harga.

Dalam dua penelitian di atas, Mariani (2013) mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal desentralisasi fiskal pascapembangunan daerah. Terdapat gap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk aspek financial endowment pasca pemekaran daerah dan juga terdapat gap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk financial privilege pasca pemekaran. Tidak ada perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal kapasitas penganggaran yang cepat setelah pemekaran daerah.

Ratna Ayu Minarsih's Research (2017) sedang menikmati efektivitas skala, kekayaan, leverage dan pendapatan antar-pemerintah dari efisiensi keuangan pemerintah pusat distrik untuk menyatakan bahwa hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran, kekayaan, pengaruh dan pendapatan antar pemerintah tidak mempengaruhi keuangan kinerja. Area Jawa Tengah Area adalah bagian dari tingkat efisiensi. Meskipun untuk model kedua, hanya variabel dan pendapatan yang berpengaruh antara pemerintah yang memiliki pengaruh yang sebagian berpengaruh dibandingkan dengan implementasi keuangan pemerintah daerah dalam tingkat efisiensi yang efektif.

Studi ini dilakukan oleh Zuhri dan Solei (2017) dengan analisis analisis pemerintah tentang Pemerintah Kaur Kaur yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kaur Kaur pada tahun 2006-2016 dilihat dari tingkat area independen yang sangat rendah (rata-rata 2,44% per tahun.). Efektivitas bantal disebut efektivitas Kabupaten Kaur pada 2011, 2013 dan 2016 tidak efisien, seperti yang ditunjukkan oleh nilai laju dari 75-89, tetapi pada 2012 sangat efektif dengan nilai 107,3. Rasio biaya operasi diklasifikasikan juga, dengan nilai 100% hingga 76,7 per tahun, sedangkan rasio pengeluaran modal diklasifikasikan sebagai nilai nominal di bawah 50 atau dengan nilai rata-rata pada tahun. hingga

23,2 per tahun). Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin cepat dari tahun ke tahun, tetapi pertumbuhan ini tergolong pertumbuhan sedang dengan nilai rata-rata tahunan sebesar 5,22%/ Tahun.

Wenny (2012) dalam penyelidikannya menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang bermaksud bahwa keseluruhan komponen pendapatan anggaran daerah (PAD) sangat mempengaruhi prestasi keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip otonomi daerah . Fenomena yang berlaku dalam kajian sebelumnya juga berlaku di kota Jambi.

Hasil analisis rasio keuangan dalam penelitian ini kemudian digunakan untuk mengevaluasi tingkat kebebasan keuangan daerah dalam menyediakan dana untuk pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja keuangan dilihat dari rasio desentralisasi fiskal, dan kinerja keuangan dilihat dari rasio desentralisasi Rasio efektivitas PAD, kinerja keuangan dilihat dari rasio independen keuangan daerah, dan kinerja keuangan dilihat dari rasio pajak daerah terhadap PAD . Dengan menggunakan analisis keuangan ini, ia akan memberikan perbandingan dengan kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, dan kemudian menggambarkan pencapaian keuangan Pemerintah Kota Jambi.

Pengukuran prestasi keuangan untuk kepentingan umum dapat digunakan sebagai penilaian dan pemulihan prestasi dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya. Di samping itu, ia juga dapat digunakan sebagai penanda aras untuk meningkatkan prestasi, terutama keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Kewujudan otonomi daerah telah mengakibatkan desentralisasi sistem pemerintahan di Kota Jambi, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi sebagai pihak yang diamanahkan untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan publik diminta untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk menilai sama ada pemerintah Kota Jambi telah berjaya menjalankan tugasnya dengan betul atau tidak. Masyarakat sebagai salah satu sumber pembangunan yang memainkan dua peranan penting dalam pembangunan, iaitu sebagai subjek atau tingkah laku serta objek pembangunan ingin ketelusan anggaran kewangan yang ada dalam Pemerintah Kota Jambi, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau prestasi Kerajaan Bandar Jambi sama ada dapat berjalan dengan baik.baik atau tidak.

Dalam hal ini, penyerapan anggaran daerah dan kota masih rendah. Sehingga September 2017 (suku ketiga) penyerapan anggaran purata untuk semua kabupaten dan kota di Provinsi Jambi hanya mencapai 49%. Penyerapan anggaran tertinggi adalah Kabupaten Kerinci, yang mencapai 87%, dan terendah adalah Kota Jambi yang hanya mencapai 42%. Selain itu, APBD Kota Jambi kebanyakan digunakan untuk perbelanjaan rutin, seperti membayar gaji pekerja (Jambi Province Bapeda, 2019). Sesuai dengan alasan ini, dalam kajian ini kota Jambi dipilih sebagai lokasi penyelidikan.

Observasi yang menarik, menetapi peraturan no 32 Tahun 2004 perkara Pemerintahan Daerah dan peraturan no 33 Tahun 2004 perkara proporsi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mewajibkan setiap pemerintah daerah harus dapat mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI), namun sekarang masih banyak pemerintah daerah yang masih terikat pada pemerintah pusat terpenting yang berkaitan dengan segi keuangan daerah. Berdasarkan keterangan ini, penyelidik berminat untuk melakukan penyelidikan dengan tajuk "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2016-2020".

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menjalankan fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999, dengan ketentuan tersedianya sumber pendapatan yang cukup bagi masyarakat setempat, Jumlah sumber pendapatan disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan daerah terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan pembiayaan. Hasil tempatan adalah hak pemerintah tempatan yang diakui sebagai penambahan nilai aset bersih untuk periode yang bersangkutan.

Selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, manajemen keuangan daerah juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah . Menurut PP nombor 105 tahun 2000, pengurusan kewangan daerah mesti dijalankan secara sistematik:

1. realistik, berniat untuk mencapai kinerja yang maksimum dengan input tertentu untuk mencapai output tertentu.
2. Ekonomik, bermaksud memperoleh input dengan kualiti dan kuantiti

tertentu pada tahap harga terendah.

3. Berkesan, bermaksud pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditentukan, iaitu dengan membandingkan output dengan hasil.
4. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang membolehkan orang ramai mengetahui dan memperoleh maklumat seluas mungkin mengenai keuangan wilayah.
5. Bertanggung jawab, yaitu merealisasikan kewajiban unit kerja untuk menjaga pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan dasar yang diamanahkan.
6. Keadilan, bermaksud keseimbangan pengagihan kuasa dan pembiayaannya.
7. Pematuhan bermaksud tindakan atau sikap yang dijalankan secara adil dan berkadar.

Kemampuan pemerintah daerah untuk menguruskan keuangan dinyatakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Definisi APBD menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah rancangan operasi keuangan pemerintah daerah yaitu menggambarkan.

2.2 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kapasitas Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Indikator Masukan (Inputs)

Indikator input adalah segala yang diperlukan agar pelaksanaan aktiviti dapat dijalankan untuk menghasilkan output. Contohnya, jumlah dana yang diperlukan, jumlah pekerja yang diperlukan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah masa yang digunakan.

2. Indikator Proses (Process)

Proses orientasi adalah untuk merumuskan ukuran aktiviti, baik dari segi kecepatan, ketepatan dan tingkat ketepatan pelaksanaan kegiatan ini. Contohnya, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dan rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan atau menghasilkan pelayanan.

3. Indikator Keluaran (Output)

Indikator output adalah sesuatu yang diharapkan dapat dicapai secara langsung dari aktiviti yang boleh dilakukan secara fisik atau bukan fisik. Contohnya, bilangan produk atau pelayanan yang dihasilkan dan ketepatan dalam menghasilkan barang atau jasa.

4. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah apa sahaja yang menggambarkan fungsi output aktiviti dalam jangka masa sederhana. Misalnya, tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai

5. Indikator Manfaat (Benefit)

Keuntungan terkait dengan tujuan utama dari pelaksanaan bisnis. Misalnya, tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

6. Indikator Dampak (Impact)

Petunjuk Kesan adalah kesannya, baik positif dan negatif. Misalnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.3 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberi tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan layanan publik diminta untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber-sumber yang dikumpulkan dari masyarakat sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Tempatan dalam menguruskan keuangan daerah mereka adalah dengan melakukan analisis keuangan APBD yang telah ditentukan dan dilaksanakan (Halim, 2015). Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam mendorong pelaksanaan manajemen keuangan daerah.
3. Masyarakat dan pemiutang, sebagai pihak yang juga akan memiliki saham dalam pemerintah tempatan, bersedia memberikan pinjaman atau membeli obligasi.

Menganalisis kinerja Keuangan pemerintah Kota Jambi adalah proses penilaian mengenai tahap kemajuan dalam mencapai pekerjaan Kota Jambi dalam sektor keuangan untuk jangka waktu tertentu. Di bawah ini ada lima macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi, yaitu:

Nisbah Keberkesanan PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang dirancang dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan berdasarkan potensi sebenar wilayah tersebut. Semakin tinggi Nisbah Keberkesanan, PAD, semakin baik kinerja pemerintah tempatan. Nisbah

Kecekapan Keuangan Wilayah menggambarkan perbandingan antara jumlah kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Keserasia menerangkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan peruntukan dana mereka untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan secara optimal

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penyelidikan kualitatif tidak terlalu tertumpu pada nomor atau nilai dalam mengukur pemboleh ubah. Penelitian ini juga hanya menjabarkan suatu keadaan (deskriptif) dari laporan keuangan yang dapat menggambarkan suatu kondisi kinerja keuangan sektor publik, yaitu Pemerintah Daerah Kota Jambi. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi tahun 2016-2020.

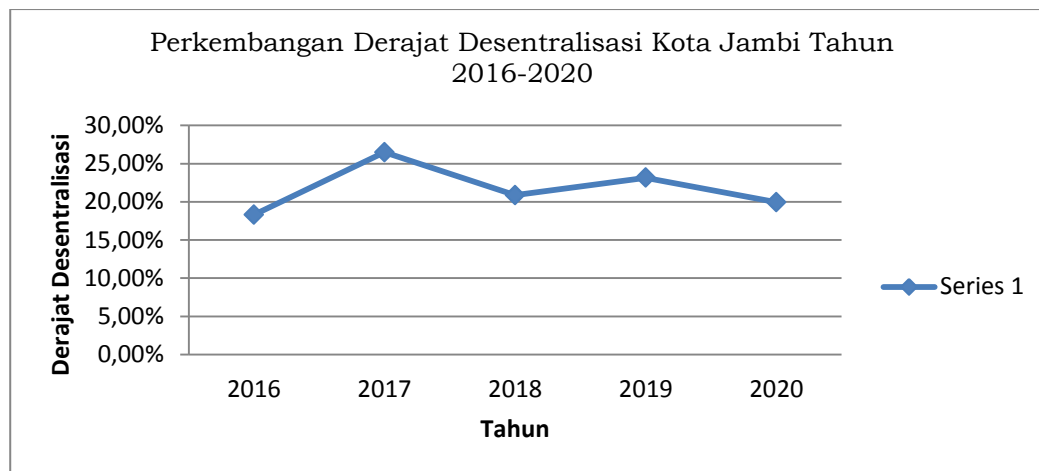
Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder yang berupa data khusus berupa Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2016-2020 yang diperoleh dari situs resmi BPS Kota Jambi. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif alat utama yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*Human Instrument*). Dalam penelitian ini peneliti tidak bisa digantikan oleh orang lain atau instrumen lain untuk melakukan penelitiannya.

4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan asli daerah	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi	keterangan
2016	287.525.214.004,49	1.571.332.218.626,47	18,30%	Kurang
2017	397.327.847.289,10	1.500.633.237.946,70	26,48%	Sedang
2018	338.891.882.592,96	1.624.877.312.712,19	20,86%	Sedang
2019	393.429.595.383,99	1.699.542.709.763,06	23,15%	Sedang
2020	369.594.193.000,00	1.597.369.067.032,00	20,16%	Sedang
Total			108,95%	
Rata-Rata			19,94%	Kurang

Gambar 1. Perkembangan Derajat Desentralisasi Kota Jambi Tahun 2016-2020



Terlihat bahwa rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan berfluktuasi dari tahun 2016 ke tahun 2020. Dari tahun 2016 hingga 2020, pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 18,30%, 26,48%, 20,86%, 23,15% dan 20,16% terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Jambi pada tahun 2016 termasuk dalam kategori kurang terdesentralisasi. Dari 2017 hingga 2020, pendapatan daerah masing-masing menyumbang 26,48%, 20,86%, 23,15% dan 20,16% dari total pendapatan. Tingkat penyelesaian desentralisasi tertinggi dalam lima tahun terakhir adalah 26,48% pada tahun 2017. Dari tahun 2016 hingga 2020, rata-rata derajat desentralisasi di Jambi hanya 19,94% (kategori lebih sedikit). Rendahnya koefisien tersebut disebabkan rendahnya pendapatan dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan desentralisasi masih kurang. Kota Jambi harus melakukan upaya untuk lebih meningkatkan PAD yang disesuaikan dengan kemampuan dan kemungkinan yang ada di Kota Jambi

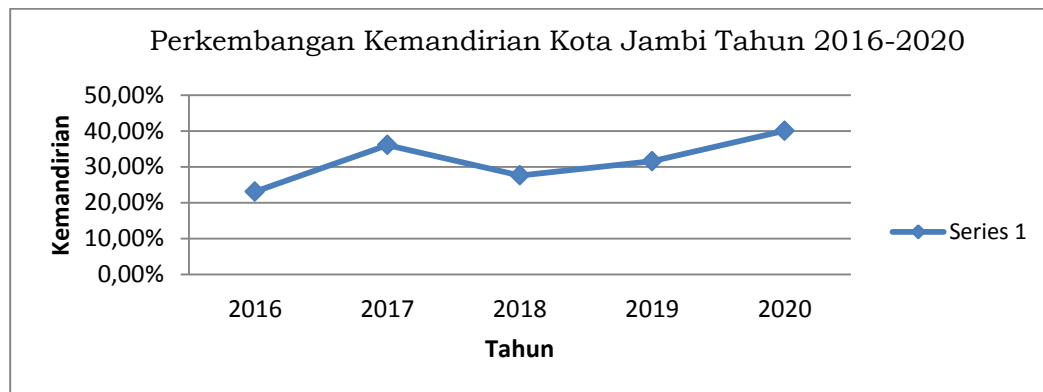
Tabel 2. Perkembangan Kemandirian Kota Jambi Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan asli daerah	Jumlah subsidi pemerintah pusat dan provinsi sekitar dan pinjaman daerah	Rasio Kemandirian	Keterangan
2016	278.525.214.004,49	1.244.767.208.043,98	23,10%	Rendah Sekali
2017	397.327.847.289,10	1.100.486.390.657,60	36,10%	Rendah
2018	338.891.882.592,96	1.226.565.920.909,83	27,63%	Rendah
2019	393.429.595.383,99	1.246.099.286.412,07	31,57%	Rendah
2020	369.594.193.000,00	1.422.511.990.899,10	40,10%	Rendah
Total			158,50%	

Rata-Rata	36,25%	Rendah
-----------	--------	--------

Sumber : Badan Pengawas Statik (BPS) Jambi

Gambar 2. Grafik Kemandirian Kota Jambi Tahun 2016-2020



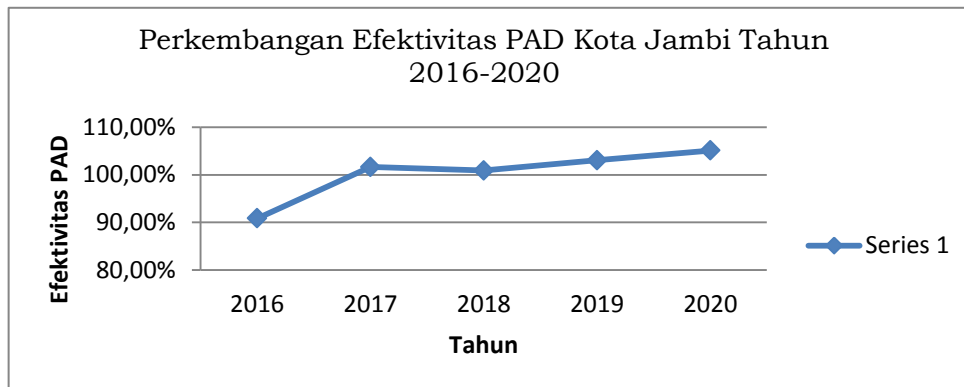
Derajat kemandirian ekonomi kota Jambi berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, kemerdekaan Kota Jambi adalah 23,10%. Artinya pola hubungan tersebut jelas berada pada tingkat yang sangat rendah. Artinya, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah (daerah yang belum bisa menerapkan otonomi daerah). Dari tahun 2017 hingga 2020, Kota Jambi memiliki tingkat kemandirian sebesar 36,10%, 27,63%, 31,57% dan 40,10% yang artinya berada pada level rendah dalam pola pembinaan. Wiraswasta tertinggi dalam lima tahun terakhir adalah 40,10% pada tahun 2020, dan wiraswasta terendah pada tahun 2016 adalah 23,10%..

Dari 2016 hingga 2020, kemandirian ekonomi rata-rata kota Jambi hanya 36,25, yang merupakan pola yang sedikit lebih rendah untuk dipertimbangkan. Artinya, peran pemerintah pusat jauh lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jambi tidak dapat sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Peran pemerintah pusat yang paling penting adalah mendukung sistem roda Pemerintah Kota Jambi khususnya dalam pembayaran gaji pegawai, biaya barang dan biaya modular

Tabel 3. Perkembangan Efektifitas PAD Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan asli daerah	Target penerimaan PAD	Efektivitas PAD	Keterangan
2016	278.525.214.004,49	316.463.773.600,00	90,86%	Cukup efektif
2017	397.327.847.289,10	390.892.633.600,00	101,65%	Sangat efektif
2018	338.891.882.592,96	335.902.135.250,00	100,89%	Sangat efektif
2019	393.429.595.383,99	381.743.685.000,00	103,06%	Sangat efektif
2020	369.594.193.000,00	403.484.193.000,00	105,15%	Sangat efektif
Total			501,61%	
Rata-Rata			100,32%	Sangat efektif

Gambar 3. Grafik Perkembangan Efektifitas PAD Tahun 2016-2020



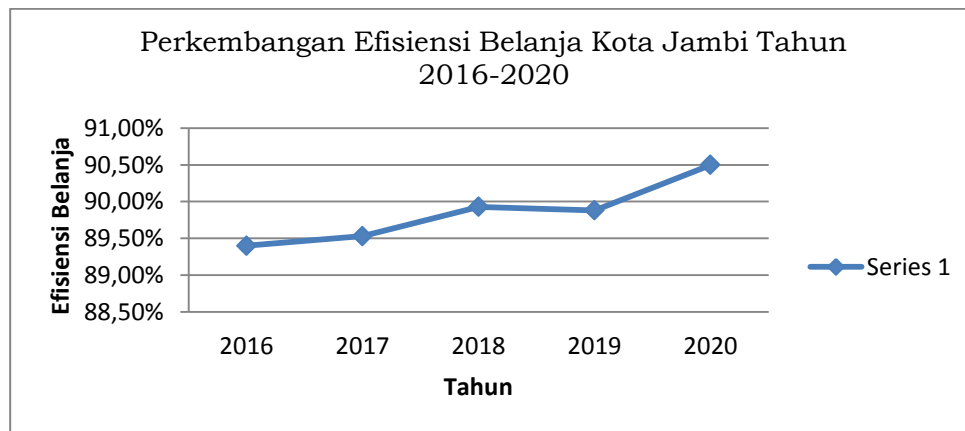
Berdasarkan tabel terlihat bahwa persentase pendapatan daerah yang diharapkan dibandingkan dengan target berubah karena kemungkinan aliran daerah. Sejak tahun 2016, proyeksi persentase pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 90,86% dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Artinya tingkat efektifnya rendah. Pada tahun 2017-2020, persentase pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi aktual daerah masing-masing sebesar 101,65%, 100,89%, 103,06% dan 105,15%..

Antara tahun 2016 dan 2020, rata-rata efikasi PAD Jambi hanya 100,32 pada tingkat sangat efektif. Menurut Mahmudi (2019), nilai efektivitas PAD di atas 100 berarti rasio efektivitas PAD berada pada kategori “sangat kuat”. Hal ini menunjukkan bahwa efek bantalan efektif di kota Jambi. Pasalnya, pendapatan dari sektor pajak properti melebihi anggaran yang diperkirakan sebelumnya. Pemkot Jambi juga terbukti telah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan PAD yang direncanakan.

Tabel 4. Realisasi Belanja Pemerintah Jambi Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Efisiensi Belanja	Keterangan
2016	1.706.345.622.920,00	1.525.413.835.576,45	89,40%	Efisien
2017	1.669.868.418.542,00	1.495.010.546.734,80	89,53%	Efisien
2018	1.753.859.500.067,00	1.577.311.832.700,20	89,93%	Efisien
2019	1.847.519.084.475,00	1.660.527.631.709,83	89,88%	Efisien
2020	2.212.680.342.930,00	1.808.545.986.443,00	90,50%	Efisien
Total			449,24%	
Rata-Rata			89,85%	Efisien

Gambar 4. Grafik Perkembangan Efisiensi Belanja Kota Jambi Tahun 2016-2020



Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja pemerintah di Jambi setiap tahun berfluktuasi antara tahun 2016 dan 2020. Kota Jambi dapat mencapai penghematan belanja dari tahun 2016 hingga 2020. Tidak ada biaya aktual yang melebihi anggaran yang ditentukan. Dari tahun 2016 hingga 2020, rata-rata rasio efisiensi belanja Kota Jambi adalah 89,85%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja di Jambi sudah efisien

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dijelaskan, Anda dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan kota, yang diukur sebagai persentase derajat desentralisasi, rata-rata rendah dari tahun 2016 hingga 2020 dan dapat dianggap berada pada kisaran 10,01% hingga 20,01%, atau 19,94%. Rendahnya koefisien tersebut disebabkan rendahnya penerimaan pendapatan daerah dibandingkan dengan total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi masih kurang memiliki kemampuan untuk melakukan desentralisasi..
2. Kinerja keuangan Jambi, diukur dengan kemandirian keuangan daerah, rata-rata 36,25 antara 2016 dan 2020, mengungkapkan pola hubungan. Artinya, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jambi tidak mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
3. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi yang diukur dengan rata-rata tingkat efektivitas PAD dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tergolong sangat efektif karena koefisiennya melebihi 100% (100,32%).

Artinya kemampuan Kota Jambi dalam mencapai PAD melebihi jumlah yang dianggarkan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan. Penerimaan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD berasal dari sektor pajak daerah, yang melebihi 4.444 dari anggaran sebelumnya. Pemkot Jambi juga terbukti telah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan PAD yang direncanakan.

4. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi diperkirakan sebesar 89,85% dengan mempertimbangkan rata-rata efisiensi belanja periode 2016-2020. Pemkot Jambi bisa menghemat uang selama periode ini. Tidak ada biaya aktual yang melebihi anggaran yang ditentukan.

Kinerja keuangan Jambi yang diukur dari pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 7,43% dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi sebesar 4.444 pertumbuhan pendapatan adalah positif. Tingkat pertumbuhan belanja adalah, tetapi rata-rata pertumbuhan belanja dari 2016 hingga 2020 adalah 5,00%.

Referensi

- Anita Wulandari, (2011). Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* Vol, 5, No, 2, November.
- Aries Djaenuri, (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Asad, A. (2021). From Bureaucratic-Centralism Management to School Based Management: Managing Human Resources in the Management of Education Program. *Indonesian Research Journal in Education |IRJE|*, 5(1), 201-225. <https://doi.org/10.22437/irje.v5i1.12947>
- Danang Prio Utomo, (2011). Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009, *Jurnal Education* Vol. 6 No. 2, Desember 2011, hal. 57-80
- Darmadji, E.S.S.H. dan Tan, Y., (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djanegara, Meormahadi, S. (2011). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik dan Permasalahan*. Jakarta: Kesatuan Press.
- Halim, A., (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, A., (2015). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendro Sumarjo, (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto, (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007, *GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3*, Desember 2010.
- Indrawan, B., Susanti, E., Utami, W., Deliza, D., Tanti, T., & Ferawati, R. (2022). *Covid-19 and Sustainable Economic: How Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sharing and Empowering Society*. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316372>
- John, M.Y. dan Setiawan, D.S., (2011). *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kus Endang Muji Rahayu, (2014). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008-2012, UMS, Surakarta.
- Mahmudi, (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(01). <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A>
- Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). the Effect of Investment, Government Expenditure, and Zakat on Job Opportunity With Economic Growth As Intervening Variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(3), 102–112. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9>
- Usdeldi, Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta Synthesis of GCG, SSB, and CSR On Islamic banking, performance and financial innovations. *Iqtishadia*, 14(1), 1–25.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ejlQBwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=islamic+economics&ots=3S7cdvFBox&sig=FmbOliOg3DIqJettaNLcung_d2U